

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya.

Pendidikan merupakan kunci utama suatu bangsa untuk membangun peradabannya. Peradaban yang bersifat dinamis, berimplikasi pada pendidikan yang terus mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu, tidak terkecuali pendidikan di Indonesia. Penyempurnaan pendidikan bertujuan agar tercipta relevansi antara pendidikan dan perkembangan zaman. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 5 tentang Pendidikan, yang berbunyi "*Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia*". Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Oleh sebab itu pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia, dengan pendidikan yang baik seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Tidak ada suatu negara majupun di dunia ini yang tidak menitik beratkan sektor pendidikan dalam membangun negara dan bangsanya, karena harkat dan martabat suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya.

Pendidikan adalah sebuah proses yang mencakup tiga dimensi yaitu, individu, masyarakat atau komunitas nasional dari individu tersebut. Pendidikan juga meliputi seluruh kandungan realitas, baik yang bersifat material maupun spiritual yang memainkan peranan penting dalam menentukan sifat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat. Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran dan pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses mentransfer ilmu, mentransformasi nilai, dan sebagai proses pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Dengan demikian pengajaran lebih berorientasi pada pembentukan spesialis atau bidang-bidang tertentu saja, oleh karena itu perhatian dan minatnya lebih bersifat teknis (Nurkholis, 2013:24-25).

Maju tidaknya suatu bangsa sangat tergantung pada pendidikan bangsa tersebut. Artinya, mutu pendidikan suatu bangsa dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan yang bermutu,

suatu bangsa menjadi maju dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain dalam segala bidang. Sebaliknya jika pendidikan suatu bangsa tidak maju atau tidak bermutu maka bangsa itu akan terbelakang di segala bidang. Begitu pula dengan Indonesia, peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan tentang tiga jalur pendidikan yang saling terkait dan saling memengaruhi antara ketiganya. Ketiga jalur pendidikan yang dimaksud, (1) jalur pendidikan formal, (2) jalur pendidikan non formal, dan (3) jalur pendidikan informal. Pada jalur pendidikan formal inilah yang secara berkelanjutan terus mengalami penyempurnaan, sehingga tetap memiliki relevansi dengan perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, maka perkembangan ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan oleh perkembangan dunia pendidikan.

Tujuan yang terpenting dari peningkatan mutu pendidikan tentunya agar kualitas manusia di Indonesia juga akan ikut meningkat. Karena sejalan dengan peningkatan kualitas manusianya maka meningkat pula kualitas sumber daya manusianya yang akan berdampak pada peningkatan pada seluruh sektor kehidupan, pemerintah maupun ekonomi di Indonesia. Menyikapi hal ini pemerintah belakangan banyak melakukan upaya untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari keadaan dimana dewasa ini banyak upaya peningkatan mutu pendidikan

terus dilakukan oleh bukan hanya pemerintah namun juga banyak pihak. Upaya-upaya tersebut dilandasi suatu kesadaran betapa pentingnya peranan pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan watak bangsa. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup baik, tetapi sebagian lainnya masih memprihatinkan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, utamanya pada sekolah sebagai tempat berlangsungnya pendidikan dan penunjang kualitas sumber daya manusia saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan. Dalam survey 3 tahunan sebagaimana survei kualitas pendidikan oleh PISA (Programme for International Student Assessment), Indonesia menduduki peringkat 72 dari 78 negara yang berpartisipasi dalam tes PISA tahun 2018 dengan hasil yang berada di peringkat keenam terbawah. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia sangat perlu untuk di tingkatkan agar sumber daya manusia di Indonesia menjadi lebih unggul dan tidak tertinggal jauh dari negara lainnya.

Selain itu sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh jaringan Pengamat Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat ada enam permasalahan pendidikan yang menjadi sorotan pada 2019. Masalah yang paling mencolok adalah soal kemampuan literasi Indonesia yang jeblok. Permasalahan tersebut dipublikasikan dalam internasional seminar and Report Launch dan dimuat oleh surat kabar online Detik News, hasil

penelitian menyatakan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih terbilang rendah.

Pendidikan bangsa Indonesia sekarang ini sangat memprihatinkan, banyak kasus-kasus yang terjadi di setiap penjuru negeri. Masalah pendidikan yang ada di Indonesia semakin hari semakin rumit, bertambah banyak dan kompleks. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, meskipun mungkin telah banyak upaya dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana dan peningkatan mutu manajemen sekolah.

Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. *Pertama*, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *input- output* analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. *Kedua*, pendekatan penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat bertanggung kepada keputusan birokrasi. Dan *ketiga*, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa, dukungan orang tua selama ini hanya hanya berupa bantuan dana sehingga orang tua tidak merasa memiliki sekolah, sebaliknya sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggung jawabkan hasil pendidikannya kepada masyarakat.

Banyaknya masalah yang diakibatkan oleh lulusan pendidikan yang tidak bermutu, program mutu atau upaya-upaya meningkatkan mutu pendidikan merupakan hal yang teramat penting. Untuk melaksanakan program mutu diperlukan beberapa dasar yang kuat, seperti komitmen pada perubahan, pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada, mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan, dan mempunyai rencana yang jelas.

Mutu lulusan yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti lulusan tidak dapat melanjutkan studi, tidak dapat menyelesaikan studinya pada jenjang yang lebih tinggi, tidak dapat bekerja atau diterima di dunia kerja, diterima kerja tetapi tidak berprestasi, tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, dan tidak produktif. Lulusan yang tidak produktif akan menjadi beban masyarakat, menambah biaya kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta memungkinkan menjadi warga yang tersisih dari masyarakat (Nana Syaodih S,dkk.2013)

Seiring dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, inovasi dalam perubahan merupakan salah satu hal yang mendapat perhatian. Peningkatan mutu pendidikan melalui standarisasi dan profesionalisasi yang sedang dilakukan dewasa ini menuntut pemahaman berbagai pihak terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai komponen sistem pendidikan.

Sekolah merupakan Lembaga Pendidikan yang dapat menunjang kualitas sumber daya manusia yang bermanfaat bagi lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga untuk meningkatkan mutu Pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, sudah seharusnya sekolah dikelola dengan manajemen yang baik dan tepat.

Umaedi dkk (2011: 1.3) memandang, sekolah sebagai wadah dari pendidikan formal berfungsi untuk mempersiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Kebijakan setiap sekolah harus benar-benar dirumuskan dengan memperhatikan kondisi sekolah itu berada, yang meliputi kondisi geografis, kultur budaya, lingkungan, maupun mata pencaharian masyarakat sekitar. Maka dari itu, sekolah hendaknya mampu menyadari kelebihan dan kekurangan komponen-komponennya.

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi ditandai dengan berlakunya undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan diserahkannya sejumlah kewenangan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perubahan kebijakan pendidikan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah menekankan bahwa pengambilan kebijakan berpindah dari pemerintah pusat (top government) ke pemerintahan daerah (district government), yang berpusat di pemerintahan kota dan Kabupaten. Dengan demikian, kewenangan-kewenangan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah berada di pundak Pemerintah Kota dan kabupaten, sehingga implementasinya akan diwarnai oleh *political will* pemerintah daerah, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, keberhasilan dan kegagalan pendidikan di sekolah sangat bergantung pada

guru, kepala sekolah dan Pengawas karena ketiga figur tersebut merupakan kunci yang menentukan serta menggerakkan berbagai komponen dan dimensi sekolah yang lain (Mulyasa, 2012). Dalam posisi tersebut baik buruknya komponen sekolah yang lain sangat ditentukan oleh kualitas guru, kepala sekolah, dan pengawas, tanpa mengurangi arti penting tenaga pendidikan yang lain. Implementasi desentralisasi pendidikan menuntut para pihak terkait tersebut untuk mengembangkan sekolah yang efektif dan produktif, dengan penuh kemandirian dan akuntabilitas.

Suparlan (2013: 3) menjelaskan, bahwa dalam era sentralisasi satuan pendidikan sekolah harus lebih banyak memperoleh petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari organisasi pada level di atasnya, maka dalam era desentralisasi ini satuan pendidikan sekolah harus secara kreatif dan inovatif dapat melaksanakan proses pengelolaan organisasi secara mandiri. Selain itu, para pemangku kepentingan (*stakeholder*) juga dituntut untuk memberikan kontribusi dalam melaksanakan proses pengelolaan sekolah, karena para stakeholder inilah yang paling memahami karakteristik maupun kebutuhan sekolah. Wohelstetter & Mohraman dalam Wahyuningrum, (2006: 42) menjelaskan, “ada tiga hal penting yang kewenangannya di desentralisasikan ke sekolah-sekolah secara langsung melalui dewan sekolah. Tiga bidang penting tersebut adalah *budget, personal, dan curriculum* “.

Senada dengan pernyataan tersebut di atas, Surbakti (2000:9), mengemukakan bahwa kewenangan otonomi diberikan kepada daerah untuk

memelihara dan mengembangkan identitas budaya lokal. Hal ini dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam pulau, bahasa, dan budaya lokal perlu dipertahankan dan dikembangkan melalui kebijakan otonomi agar kearifan lokal tetap terjaga dan diharapkan mampu menunjang pembangunan nasional. Upaya untuk melancarkan dan mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah terutama di bidang pendidikan, dibutuhkan manusia yang berkualitas sebagaimana fungsi pendidikan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Fungsi pendidikan tersebut mengandung harapan yang sangat besar terhadap pembentukan manusia yang berkualitas demi kelancaran pembangunan bangsa Indonesia terutama pada wilayah daerah yang diberikan mandat untuk mengembangkan dan mengintegrasikan budaya lokal ke dalam wilayah pendidikan nasional, sehingga terjadi keseimbangan pengetahuan nasional dan pengetahuan lokal daerah.

Upaya untuk merealisasikan harapan-harapan tersebut, berbagai pembaharuan dalam pendidikan terus diupayakan oleh pemerintah. Pembaharuan tersebut ada yang menyangkut pengambilan keputusan dan kebijakan, Paradigma manajemen, pengelolaan sumber-sumber, paradigma pengembangan kurikulum, pengelolaan keuangan, serta mekanisme evaluasi. Pembaharuan pendidikan yang menyangkut pengambilan keputusan dan kebijakan misalnya, dengan diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004

tentang desentralisasi pemerintahan, salah satu bidang yang ikut di desentralisasikan adalah bidang pendidikan.

Oleh sebab itu pesatnya pertumbuhan dan perkembangan sekolah pada saat ini, menuntut manajemen yang baik dan profesional. Manajemen yang baik dan profesional inilah yang akan menghasilkan lulusan/ *output* yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan seluruh pihak yang berkepentingan.

Namun sebagian satuan pendidikan masih belum dapat mengembangkan dirinya. Hal ini dikarenakan hanya berfokus pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah saja, sedangkan aset yang ada di sekolah tidak dimanfaatkan. Maka dari itu, kita selaku pendidik, hendaklah dapat mengembangkan sekolah dengan aset yang ada, karena Sekolah sebagai sebuah institusi perlu mengembangkan diri untuk menjadi tempat murid dan warga sekolah berkreasi dan berkontribusi.

Untuk mencapai hal yang dimaksud tersebut, diperlukan ekosistem sekolah yang mendukung. Sekolah harus dikondisikan sedemikian rupa, sehingga menjadi motivasi bagi seluruh warga sekolah untuk dapat berkontribusi. Dimulai dari kepala sekolah sebagai pemimpin, guru, dan murid haruslah mengembangkan potensi yang ada dan yang dimiliki sekolah. Hal inilah yang sepatutnya seluruh stakeholder harus dapat mengembangkannya sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah.

Selain itu, sekecil apapun potensi yang dimiliki sekolah merupakan aset yang sangat berharga untuk dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan menjadi modal utama. Sumber daya yang dikelola dengan pengelolaan yang cerdas akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar.

Tentunya tidak lepas dari pengelolaan yang terukur dan terarah sesuai dengan kekuatan yang dimiliki sekolah. Kekuatan tersebut akan bisa diketahui jika dilakukan pemetaan yang benar dan terfokus pada sumber tersebut. Sebagaimana diketahui, sekolah mempunyai berbagai sumber, baik sumber daya lingkungan, maupun sumber daya manusianya. Semuanya merupakan aset bagi sekolah yang ingin mengembangkan institusinya. Dari hasil pemetaan inilah akan menjadi dasar pijakan untuk memulai mengembangkan sekolah.

Kemudian, terdapat tujuh sumber daya yang terdiri dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan/alam, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya. Berikutnya, pengembangan komunitas berbasis aset merupakan strategi atau langkah yang sangat efektif dan relevan dikembangkan dalam sebuah komunitas sekolah. Strategi ini nantinya memadukan dua kekuatan yang bersumber dari kekuatan sumber daya manusia (biotik) dan kekuatan yang bersumber dari lingkungan fisik (abiotik). Jika kedua kekuatan ini dipadukan maka akan dapat dijadikan sebuah dasar dalam mengelola sebuah komunitas sekolah agar dapat berkembang dan memiliki nilai keunikan tersendiri. Pada dasarnya, faktor biotik dan abiotik yang ada di sekolah merupakan suatu aset sekolah yang harus dimanfaatkan sebagai sebuah bentuk untuk mencapai visi, misi, dan program sekolah.

Menurut Green & Haine (2010) dalam Modul Pembelajaran 3.2 Calon Guru Penggerak, terdapat perbedaan yang jelas antara sekolah yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan sekolah yang menggunakan pendekatan berbasis aset. Perbedaan antara sekolah yang

menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset, adalah sebagai berikut: Sekolah berbasis pada kekurangan/masalah/hambatan, mempunyai ciri-ciri: (1) Fokus pada masalah dan isu, (2) Berkutat pada masalah utama, (3) Mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan – selalu bertanya apa yang kurang, (4) Fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, (5) Merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, dan (6) Mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Di lain pihak, beda halnya dengan sekolah yang berbasis pada aset. Sekolah ini memiliki ciri-ciri: (1) Fokus pada kekuatan, (2) Membayangkan masa depan, (3) Berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, (4) Mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya (aset dan kekuatan), (5) Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, dan (6) Melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan.

Selanjutnya, pengembangan komunitas yang ada di sekolah adalah sebagai sebuah tujuan untuk mengembangkan sekolah, bukan sebagai penerima tetapi sebagai pelaksana dari pengembangan aset tersebut dengan program yang telah disusun berdasarkan pemetaan.

Menurut Green dan Haines (2002), ada tujuh aset utama atau modal utama dalam pengembangan komunitas berbasis aset, yaitu: (1) Modal manusia, (2) Modal sosial, (3) Modal fisik, (4) Modal lingkungan/alam, (5) Modal finansial, (6) Modal politik, dan (7) Modal agama dan budaya.

Sekolah yang memanfaatkan hasil pemetaan sumber daya, akan memiliki program yang memanfaatkan sumber daya di lingkungan sekolah menjadi aset dan kekuatan sebagai dasar untuk mengembangkan sekolahnya

dengan tidak selalu memikirkan kekurangan.

Sayangnya, selama ini aspek pemanfaatan manajemen sekolah pada berbagai tingkat dan satuan pendidikan belum mendapat perhatian yang serius sehingga seluruh komponen lingkungan sekolah kurang berfungsi dengan baik. Lemahnya penerapan manajemen pendidikan juga memberikan dampak terhadap efisiensi internal pendidikan serta asset lingkungan atau modal yang ada, hal ini mengakibatkan pada pengoptimalan potensi yang seharusnya tercapai menjadi terhambat.

Peningkatan mutu (kualitas) pendidikan di sekolah perlu didukung kemampuan manajerial para kepala sekolah sebagai aktor utama dalam menjalankan manajemen sekolah. Seiring berkembangnya zaman, sekolah sebagai wadah berlangsungnya pendidikan, perlu berkembang maju dari tahun ke tahun. Karena itu hubungan baik antar stake holder sekolah perlu diciptakan agar terjalin iklim dan suasana kerja yang kondusif dan menyenangkan. Demikian halnya penataan penampilan fisik dan manajemen sekolah perlu dibina agar sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang dapat menumbuhkan kreativitas, disiplin, dan semangat belajar peserta didik.

Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (1991) dalam Mulyasa (2014: 21) menunjukkan, “Manajemen sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan”. Oleh sebab itu dibutuhkan penerapan Manajemen Sekolah yang tepat sehingga dapat mendapatkan hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya mutu Pendidikan di sekolah. Pembaharuan dalam sistem pengelolaan pendidikan dapat dilihat dengan adanya konsep *School*

Based Management (MBS), yaitu model pengelolaan pendidikan yang lebih memberikan kemandirian masing-masing satuan pendidikan untuk mengelola dan mengurus sekolahnya sesuai dengan kebutuhan dan potensinya dengan dibantu oleh masyarakat setempat.

Suparlan (2013: 61) menjelaskan, “dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka secara formal kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) telah diadopsi untuk 216.000 lembaga pendidikan sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta, termasuk madrasah negeri dan swasta”. Penjelasan tersebut menegaskan, bahwa MBS memang ditujukan bagi seluruh satuan pendidikan di Indonesia, tanpa terkecuali. Setiap satuan pendidikan diharapkan mampu mengimplementasikan sistem MBS dengan tujuan terciptanya kemandirian sekolah dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing sekolah.

Dalam penerapannya, kebijakan MBS tersebut dapat mengantarkan sekolah lebih mandiri melalui pemberian kewenangan (otonom) dan fleksibilitas kepala sekolah dalam mengelola sumber daya atau asset sekolah; mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pembaharuan dalam pengelolaan sumber-sumber belajar dapat dilihat dengan adanya keterlibatan masyarakat serta pemanfaatan lingkungan sebagai faktor pendukung pembelajaran, serta adanya ruang bagi pendidik untuk menciptakan sumber belajar dengan memanfaatkan potensi lingkungan demi mencapai hasil belajar yang maksimal. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan penggerak utama dalam pemaksimalan pemanfaatan pada

aset-aset sekolah.

Aset-aset tersebut sudah seharusnya dapat dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran dengan memperhatikan diferensiasi lingkungan sebagai sebuah kekuatan/potensi sekolah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun aset yang dimaksud yaitu aset sekolah yang terdiri dari dua macam yaitu aset tidak bergerak (prasarana) dan aset bergerak (sarana). Aset tidak bergerak (prasarana) meliputi lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instansi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.

Aset - aset yang dimiliki sekolah adalah bagian penting dalam menyediakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan nyaman bagi siswa dan staf pengajar. Aset-aset tersebut membantu dalam memberikan fasilitas fisik yang diperlukan untuk pengajaran, pembelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler. Pentingnya aset sekolah terletak pada fungsinya untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran. Misalnya, gedung sekolah memberikan ruang yang aman dan teratur untuk mengadakan kegiatan belajar-mengajar, sedangkan perpustakaan menyediakan sumber daya penting seperti buku-buku dan referensi. Manajemen aset sekolah melibatkan pengelolaan dan pemeliharaan properti tersebut agar tetap dalam kondisi yang baik dan berfungsi dengan baik. Ini meliputi perencanaan perawatan rutin, penggantian peralatan yang rusak atau usang, dan investasi dalam pembaruan infrastruktur. Dalam beberapa kasus, aset sekolah juga dapat mencakup aset finansial, seperti dana tabungan atau investasi yang dimiliki oleh sekolah. Pengelolaan aset finansial ini juga menjadi tanggung jawab

pihak sekolah untuk memastikan dana tersebut digunakan dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan aset sekolah, lembaga pendidikan biasanya memiliki tim atau departemen yang bertanggung jawab untuk mengatur dan merawat aset-aset tersebut. Disinilah peran Manajemen Berbasis Sekolah sangat dibutuhkan, agar potensi-potensi atau aset-aset yang dimiliki oleh sekolah dapat digali dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan, bahwa SMP Negeri 1 Torjun merupakan salah satu lembaga pendidikan yang telah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah. Dengan adanya penerapan Manajemen Berbasis Sekolah menjadikan sekolah lebih mandiri dalam mengelola lembaganya sendiri, serta dapat memungkinkan memunculkan kreatifitas dalam memanfaatkan mutu pendidikan di sekolah.

Untuk itu penulis mengadakan penelitian tentang apakah Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Torjun sudah berjalan maksimal secara menyeluruh ataukah masih dalam wilayah tataran konsep yang berkembang di dunia pendidikan. Dengan melihat kondisi di SMP Negeri 1 Torjun ternyata prestasi akademik maupun non akademik yang diraih terbilang banyak, baik itu prestasi siswa, guru, maupun sekolah. Selain itu SMP Negeri 1 Torjun juga banyak diminati oleh masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMP Negeri 1 Torjun. Sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah dengan begitu banyaknya prestasi yang diraih oleh peserta didik, guru dan sekolah serta banyak diminati oleh masyarakat merupakan hasil penerapan Manajemen Berbasis Sekolah.

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis mengadakan penelitian di SMP Negeri 1 Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan judul: “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Torjun”.

1.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang tersebut, penulis menjabarkan ke dalam tiga masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam peningkatan mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Torjun ?
2. Apa saja factor yang mempengaruhi dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Negeri 1 Torjun ?
3. Bagaimana produk Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMPN 1 Torjun ?

1.3 Tujuan Penelitian

Segala sesuatu yang dilakukan memiliki tujuan dan manfaat dari yang di lakukan. Demikian pula dengan penelitian ini, mempunyai tujuan tertentu yang akan di capai. Adapun tujuan yang akan hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Torjun.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Negeri 1 Torjun.
3. Untuk mengetahui produk Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMPN 1 Torjun ?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, berkaitan dengan hal-hal berikut.

1. Mengidentifikasi implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang meliputi prinsip kemandirian sekolah, kemitraan sekolah dengan masyarakat, bentuk partisipasi *stakeholder*, keterbukaan sekolah, dan akuntabilitas di SMP Negeri 1 Torjun.
2. Menganalisis pengaruh Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terhadap mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Torjun
3. Menganalisis produk hasil penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Negeri 1 Torjun

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi guru, sekolah, masyarakat, dan peneliti.

1. Bagi Sekolah

Manfaat MBS akan menghasilkan nilai positif bagi sekolah, antara lain sebagai berikut :

- a. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
- b. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan skala prioritas.

- c. Pengambilan keputusan lebih partisipatif terutama dalam hal:
 - 1) Menetapkan sasaran peningkatan mutu.
 - 2) Menyusun rencana peningkatan mutu.
 - 3) Melaksanakan rencana peningkatan mutu.
 - 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu.
- d. Penggunaan dana lebih efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritasnya.
- e. Keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi.
- f. Menumbuhkan persaingan sehat sehingga diharapkan adanya upaya inovatif.

Dengan memperjelas indikator dan pencapaian mutu pada pencapaian tujuan akan memandu sekolah memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan mengukur pencapaian kinerja. Penerapan MBS yang efektif secara spesifik mengidentifikasi beberapa manfaat spesifik dari penerapan MBS sebagai berikut:

- a. Memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan peningkatan pembelajaran.
- b. Memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting.
- c. Mendorong munculnya kreatifitas dalam merancang

bangun program pembelajaran.

- d. Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah.
- e. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistis ketika orang tua dan guru semakin menyadari keadaan keuangan sekolah, Batasan pengeluaran, dan biaya program-program sekolah.
- f. Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan di semua level.

Diharapkan dengan menerapkan manajemen pola MBS, sekolah juga lebih berdaya dalam hal berikut :

- a. Menyadari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi sekolah tersebut
- b. Mengetahui sumber daya yang dimiliki dan “input” pendidikan yang akan dikembangkan.
- c. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk kemajuan lembaganya.
- d. Bertanggung jawab terhadap orang tua, masyarakat, Lembaga terkait, dan pemerintah dalam penyelenggaraan sekolah
- e. Persaingan sehat dengan sekolah lain dalam usaha usaha kreatif-inovatif untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan.
- f. Upaya meningkatkan peran serta komite sekolah,

masyarakat, DUDI (dunia usaha dan dunia industri) untuk mendukung kinerja sekolah.

- g. Program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan proses belajar mengajar (kurikulum), bukan kepentingan administratif saja.
- h. Mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi lingkungan sekolah walau beda dari pola umum atau kebiasaan.

Jadi melalui pemaparan manfaat untuk sekolah tersebut, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi sekolah, sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan bagi SMP Negeri 1 Torjun dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mengimplementasikan MBS terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Torjun;
- b. Sebagai tolak ukur bagi sekolah untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Torjun.

2. Bagi Guru

Sebagai bahan masukan bagi guru dalam mengimplementasikan MBS, khususnya pada komponen manajemen kurikulum dan program pengajaran, manajemen tenaga kependidikan, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat dan pengaruhnya terhadap peningkatan mutu

pendidikan. Penerapan manajemen berbasis sekolah memiliki sejumlah manfaat bagi guru, antara lain:

- a. Otonomi Profesional: Manajemen berbasis sekolah memberi guru otonomi untuk mengambil keputusan terkait metode pengajaran, kurikulum, dan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan siswa mereka. Guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dan efektif sesuai dengan gaya belajar siswa mereka, memberikan mereka kontrol yang lebih besar atas proses pengajaran.
- b. Kolaborasi dan Tim Kerja: Manajemen berbasis sekolah mendorong kolaborasi dan kerja tim di antara guru. Mereka dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dengan sesama guru, saling mendukung, dan mempelajari praktik terbaik satu sama lain. Hal ini memungkinkan pengembangan profesional yang berkelanjutan dan peningkatan mutu pengajaran.
- c. Pengembangan Profesional: Dalam manajemen berbasis sekolah, guru memiliki akses ke pelatihan dan pengembangan profesional yang relevan dengan kebutuhan mereka. Mereka dapat mengikuti workshop, seminar, atau program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan pemahaman mereka tentang pendekatan pembelajaran terkini. Penerapan manajemen berbasis sekolah memungkinkan guru terus mengembangkan diri

mereka secara profesional.

- d. **Motivasi dan Kepuasan Kerja:** Guru yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan memiliki tanggung jawab atas pengelolaan kelas dan pembelajaran merasa lebih termotivasi dan puas dengan pekerjaan mereka. Mereka merasa memiliki kontrol yang lebih besar dan merasa dihargai atas kontribusi mereka. Ini berdampak positif pada kualitas pengajaran dan hubungan mereka dengan siswa.
- e. **Efisiensi dan Penggunaan Sumber Daya yang Optimal:** Manajemen berbasis sekolah membantu guru dalam mengelola sumber daya yang tersedia secara efisien. Guru dapat merencanakan penggunaan waktu, anggaran, dan fasilitas dengan baik, memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Hal ini dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi sekolah.
- f. **Peningkatan Prestasi Siswa:** Dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah, guru dapat memfokuskan upaya mereka pada peningkatan prestasi siswa. Mereka dapat mengidentifikasi kebutuhan individu siswa, memberikan bantuan yang tepat, dan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif. Melalui kolaborasi dengan sesama guru dan penggunaan praktik terbaik, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan memotivasi siswa untuk mencapai hasil yang lebih

baik.

Manajemen berbasis sekolah memberikan ruang bagi guru untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan mengelola proses pembelajaran. Ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi guru, tetapi juga meningkatkan kualitas pengajaran dan prestasi siswa.

3. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan MBS dan pengaruh implementasi MBS terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Penerapan manajemen berbasis sekolah memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat, antara lain:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan: Manajemen berbasis sekolah memungkinkan para pendidik dan staf sekolah untuk mengambil keputusan yang lebih efektif dan tepat dalam mengelola pendidikan. Dengan adanya partisipasi aktif dari guru, siswa, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya, sekolah dapat menyesuaikan program pendidikan mereka dengan kebutuhan lokal, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan.
- b. Pemberdayaan masyarakat: Melalui manajemen berbasis sekolah, masyarakat secara langsung terlibat dalam

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pendidikan. Hal ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam perencanaan kurikulum, penilaian, seleksi guru, dan penggunaan sumber daya sekolah. Dengan demikian, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak mereka dan memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu melalui Manajemen Berbasis Sekolah, masyarakat sebagai pelaksana DUDI (dunia usaha dan industri) dapat menjadi rekan dalam pengembangan mutu sekolah.

- c. Peningkatan aksesibilitas pendidikan: Manajemen berbasis sekolah dapat membantu memastikan bahwa pendidikan tersedia dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah atau daerah terpencil. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kebutuhan khusus dari berbagai kelompok masyarakat dapat diakomodasi dengan lebih baik.
- d. Pengembangan keterampilan kepemimpinan: Manajemen berbasis sekolah memberikan kesempatan bagi para pendidik dan staf sekolah untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Dengan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka dapat belajar tentang

manajemen, komunikasi, negosiasi, dan kepemimpinan yang efektif. Keterampilan ini tidak hanya berguna dalam konteks sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan karir profesional mereka.

- e. Meningkatkan hubungan sekolah-masyarakat: Dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah, hubungan antara sekolah dan masyarakat menjadi lebih erat. Masyarakat merasa terlibat dalam proses pembelajaran dan pengembangan anak-anak mereka, sedangkan sekolah dapat memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pendidikan. Keterlibatan masyarakat ini juga dapat memperkuat dukungan dan rasa kepercayaan terhadap sekolah.

Secara keseluruhan, penerapan manajemen berbasis sekolah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan aksesibilitas pendidikan, pengembangan keterampilan kepemimpinan, dan peningkatan hubungan sekolah-masyarakat.

4. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti terkait pelaksanaan MBS di tingkat sekolah Menengah dan pengaruhnya terhadap peningkatan mutu Pendidikan. Penerapan Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS) memiliki beberapa manfaat bagi peneliti, antara lain:

- a. Akses ke data dan informasi: Dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) , peneliti dapat lebih mudah mengakses data dan informasi yang relevan untuk penelitian mereka. Pihak sekolah dapat menyediakan data tentang siswa, guru, kurikulum, dan kegiatan sekolah lainnya, yang dapat digunakan oleh peneliti untuk melengkapi penelitian mereka.
- b. Kolaborasi dan partisipasi: Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) mendorong kolaborasi antara peneliti dan pihak sekolah. Peneliti dapat bekerja sama dengan kepala sekolah, guru, dan staf sekolah lainnya untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang lingkungan sekolah dan meningkatkan partisipasi dari pihak-pihak terkait dalam penelitian mereka.
- c. Peluang penelitian yang relevan: Dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) , peneliti dapat mengidentifikasi peluang penelitian yang relevan dengan konteks pendidikan di sekolah. Mereka dapat mempelajari efektivitas kebijakan sekolah, praktik pengajaran, atau program khusus yang dilaksanakan di sekolah. Dengan

demikian, peneliti dapat menghasilkan temuan yang lebih bermanfaat bagi pengembangan pendidikan dan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi prestasi siswa.

- d. Implementasi dan evaluasi kebijakan: Peneliti juga dapat memanfaatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk mengkaji implementasi kebijakan pendidikan. Mereka dapat menganalisis bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diadopsi, diinterpretasikan, dan dijalankan di tingkat sekolah. Selain itu, peneliti juga dapat mengukur dampak kebijakan terhadap siswa, guru, dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi perbaikan kebijakan dan tindakan lebih lanjut.

Penerapan hasil penelitian: Dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), penelitian dapat diintegrasikan ke dalam praktik sehari-hari di sekolah. Peneliti dapat bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memahami temuan penelitian dan mengembangkan strategi implementasi yang efektif. Melalui kolaborasi ini, penelitian dapat berkontribusi langsung pada perbaikan pendidikan di tingkat sekolah.

Secara keseluruhan, penerapan manajemen berbasis sekolah memberikan peluang dan akses yang lebih baik bagi

peneliti untuk bekerja dalam konteks pendidikan. Ini dapat meningkatkan relevansi, kualitas, dan dampak penelitian mereka, serta membantu dalam pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih baik.

1.5 Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, penulis mengemukakan arti dari beberapa istilah yang terdapat pada skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Torjun”. Selain itu juga menjadi penegasan terhadap setiap kata yang digunakan. Penegasan ini sekaligus dapat menghindarkan pembaca dari kesalah pemahaman. Dalam konteks MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), berikut adalah beberapa istilah yang umum digunakan :

1. Implementasi : Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/ penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).
2. Manajemen berbasis sekolah: Manajemen berbasis sekolah adalah pemberian otonomi lebih besar kepada sekolah untuk memberdayakan diri dalam kerangka upaya meningkatkan mutu dan pemerataan Pendidikan. Pendekatan manajemen dalam pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi dan tanggung jawab kepada kepala sekolah dan staf sekolah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pendidikan.

3. Peningkatan mutu pendidikan: yang dimaksud dengan peningkatan mutu pendidikan adalah serangkaian dari hasil yang dicapai oleh pendidikan yang dapat dijadikan tolak ukur dan standarisasi dari pencapaian tujuan pendidikan nasional yang terdiri dari *input*, *output*, dan *outcome*. Mutu, secara leksikal dalam kamus *besar bahasa indonesia*, mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf, atau derajat, (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya).
4. Kepala Sekolah: Pemimpin utama di sebuah sekolah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan operasional sekolah, termasuk pembuatan keputusan strategis, pengawasan staf, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik.
5. Dewan Sekolah: Organisasi yang terdiri dari perwakilan guru, staf sekolah, orang tua, dan masyarakat yang memiliki peran dalam memberikan masukan dan saran kepada kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah.
6. Partisipasi Komunitas: Melibatkan dan mengikutsertakan orang tua, siswa, dan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan yang terkait dengan sekolah, sehingga menciptakan hubungan yang kuat antara sekolah dan komunitas.
7. Pengembangan Kurikulum: Proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum sekolah yang berfokus pada kebutuhan siswa, mengintegrasikan standar nasional dan kebijakan pendidikan, serta mempertimbangkan karakteristik lokal dan budaya sekolah.
8. Penilaian dan Pemantauan: Proses evaluasi yang terus-menerus

terhadap pencapaian siswa, penilaian staf pengajar, dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sekolah secara keseluruhan untuk memastikan pencapaian tujuan pendidikan.

9. **Pengelolaan Sumber Daya:** Pengaturan dan penggunaan efisien sumber daya sekolah, termasuk anggaran, fasilitas fisik, peralatan, bahan ajar, dan tenaga pendidik, dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai hasil yang diinginkan.
10. **Kemitraan Sekolah-Keluarga-Masyarakat:** Kerjasama antara sekolah, orang tua, siswa, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan yang berkualitas, termasuk komunikasi yang terbuka, kolaborasi dalam program pendidikan, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah.
11. **Rencana Sekolah:** Dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, dan strategi pengembangan sekolah, serta langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
12. **Evaluasi Diri Sekolah:** Proses refleksi dan penilaian internal oleh sekolah terhadap keberhasilan implementasi program-program dan kegiatan sekolah, serta pengukuran pencapaian tujuan pendidikan secara berkelanjutan.